

RUNTUHNYA HEGEMONI NEGARA DALAM MENENTUKAN KURIKULUM PESANTREN

Moh. Hefni

(Penulis adalah dosen STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan.
Kontak person 0818582317, alamat rumah Kecamatan Pademawu Pamekasan)

Abstract

This article explains how the state commits a hegemony against pesantren (Islamic boarding school) and how pesantren performs a counter-hegemony. The writer uses the concept of Hegemony purposed by Gramsci. State hegemony against pesantren has started since the colonialism of the East Indies through the penetration of modernization discourse issued to the pesantren circle. The hegemony continued in the era of new order (orde baru) by publishing an integrated-letter of acknowledgment (SKB) released by three ministries in 1975. It claimed that pesantren and madrasah became the part of national education. As a result, the composition of Madrasah instructional material must be 60% for general science and the rest was for religious science. Yet, when the state hegemony comes to the peak point pesantren undergoes a counter-hegemony. Pesantren still maintains its distinct educational system independently; the educational system includes the curriculum as well as the instructional process. This firm act results a state acceptance. Since 1998 the government has released a letter of acknowledgment of degree equating. This model of pesantren known as pesantren mu'adalah (equation). The graduation certificate of pesantren could be used for any purposes, as the certificate of MA and SMA do.

Kata-kata kunci

hegemoni, hegemoni tandingan, negara, kurikulum, pesantren, mu'adalah

Pendahuluan

Terdapat sebuah asumsi bahwa inovasi lembaga pendidikan akar rumput dapat berkembang secara wajar, apabila mereka tidak ada campur tangan negara secara berlebihan. Dalam hubungan ini, otonomi daerah dapat dipandang sebagai sebuah sistem administrasi negara yang mampu mengapresiasi dan mengakomodasi khasanah dan inovasi lokal.

Dari sudut pandang sosiologi, otonomi daerah, di satu sisi, merupakan pelembagaan ruang publik bagi kreativitas akar rumput dengan mengaktifkan kembali partisipasi masyarakat, mengapresiasi dan mengakomodasi tradisi dan inovasi akar rumput. Di sisi lain, otonomi daerah dapat membatasi intervensi negara dalam wilayah masyarakat, dan pada saat yang

sama menempatkan pemerintah sebagai fasilitator.¹

Pola *top down*, yang menjadi ciri khas pola pembangunan Orde Baru, ternyata banyak sekali mengikis kecakapan-kecakapan bermasyarakat di tingkat lokal. Negara, dengan dalih pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial politik, terlalu banyak melakukan intervensi terhadap kehidupan masyarakat lokal. Intervensi ini dilakukan oleh aparat birokrasi, aparat represi (tentara), dan lembaga pendidikan, dan sebagainya. Kecenderungan interventif ini diakomodasi oleh sistem administrasi negara yang sangat sentralistis. Sistem inilah yang kemudian menjadikan kekuasaan rezim ini bertahan begitu lama. Kebertahanan ini rezim ini juga ditopang oleh kemampuannya untuk mengakomodasikan semua kepentingan dari kelompok-kelompok masyarakat dalam sebuah aktifitas yang mempunyai sinergitas.

Tulisan ini mengupas bagaimana pemerintah pada era Orde Baru yang menggunakan pola *top down* melakukan hegemoni dalam bentuk intervensi persuasif terhadap kurikulum pesantren dan bagaimana pesantren melakukan hegemoni tandingan atas hegemoni negara tersebut.

Mengurai Konsep Hegemoni

Hegemoni (bahasa Yunani: *hegemonía*) pada awalnya merujuk pada dominasi (kepemimpinan) suatu negara-kota Yunani terhadap negara-kota lain dan berkembang menjadi dominasi

negara terhadap negara lain.² Namun saat ini, kepemimpinan tersebut menunjukkan pada sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara 'pemimpin'.³ Bagi Gramsci, konsep hegemoni berarti sesuatu yang lebih kompleks. Gramsci menggunakan konsep ini untuk meneliti bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologis tertentu yang lewatnya, dalam suatu masyarakat yang ada, sesuatu kelas fundamental dapat membangun kepemimpinannya sebagai sesuatu yang bersifat memaksa.⁴

Teori hegemoni tidak bisa dilepaskan dari tokoh Antonio Gramsci.⁵

² Peter Davies, *The American Heritage Dictionary of The English Language* (New York: Dell Publishing Co., Inc., 1977)

³ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 115-116.

⁴ Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 62-63.

⁵ Gramsci lahir di Ales, sebuah kota kecil di Sardinia, Italia, pada 22 Januari 1891. Ia adalah anak keempat dari tujuh bersaudara. Ia berasal dari sebuah keluarga yang tidak terlalu miskin, ayahnya adalah seorang kolonel dari Naples. Kondisi Sardinia sebagai daerah miskin dan terbelakang, memotivasi keluarga Gramsci untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, keinginan itu pupus ketika sang ayah dipecat dari pekerjaannya karena diduga melakukan kecurangan administrasi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sang ibu terpaksa menjadi tukang jahit, sedangkan Gramsci dan saudaranya, Genaro, mengabdikan diri di kantor bekas ayahnya bekerja. Pada tahun 1911, sebuah keberuntungan menyapa Gramsci, ia memenangkan perolehan beasiswa di sebuah Universitas di Turin, Italia. Pada masa-masa menjadi mahasiswa, ia tertarik pada aktifitas politik dan gerakan buruh di Turin. Pada 1913, ia bergabung dengan Partai Sosialis Italia. Pada 1924, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Italia (PCI), setelah dua tahun sebelumnya, 1922-1923, ia dipercaya sebagai wakil PCI di Moskow. Setelah dua menjabat Sekjen PCI, pada 1926 ia ditangkap dan dipenjarakan selama 20 tahun 4 bulan 15 hari. Di dalam penjara itulah, ia menulis idenya tentang

¹ Asep Suryana, "Menolak Instrumentasi Negara: Ruang Gerak Pesantren dalam Otonomi Daerah", *Jurnal Antropologi Indonesia* 26 (65): 96-108

la adalah pemegang hak paten perbincangan konsep hegemoni. *Starting point* konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan dua cara, yaitu kekerasan dan persuasi.⁶ Cara kekerasan (represif) yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya disebut dengan hegemoni. Perantara tindak dominasi ini dilakukan oleh para aparaturnegara seperti polisi, tentara, dan hakim. Sedangkan hegemoni dilakukan secara persuasif dalam bentuk menanamkan ideologi untuk menguasai pikiran kelas atau lapisan masyarakat di bawahnya,⁷ tanpa adanya paksaan. Hegemoni ini diraih secara politis melalui upaya-upaya moral dan intelektual untuk menciptakan keseragaman pandangan dalam sebuah masyarakat.

Dalam mengembangkan konsep hegemoni tersebut, Gramsci terinspirasi oleh apa yang dilakukan Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin) dalam usaha mendapatkan dukungan rakyatnya. Misalnya pada saat menghadapi Tsarisme, Lenin sadar dirinya harus mendapat dukungan sebagian besar rakyatnya agar dapat menggulingkan Tsarisme. Lenin kemudian memikirkan strategi untuk mencapai kesadaran para pekerja, yakni bukan saja memberdayakan berbagai serikat pekerja, tetapi juga melibatkan kelompok-

kelompok lain, yang di dalamnya termasuk kritikus borjuis, petani, dan intelektual ke dalam sebuah gerakan. Kesadaran kelompok-kelompok ini bagi Lenin merupakan modal utama untuk menggulingkan Tsarisme.⁸ Lenin menyebarkan pengetahuan politik kepada para pekerja dan membaurkan para pengikut Partai Sosial Demokrat dengan segala kelas di masyarakat untuk mencapai kesadaran yang ia inginkan.⁹ Apa yang dilakukan Lenin itulah yang disebut Gramsci sebagai contoh hegemoni. Hegemoni beroperasi pada ranah suprastruktur. Oleh karena itu, hegemoni dicapai melalui persetujuan-persetujuan masyarakat, bukan dengan cara pemaksaan-pemaksaan fisik.

Gramsci mengembangkan konsep hegemoni dengan berpijak pada kepemimpinan yang sifatnya 'intelektual dan moral'. Kepemimpinan ini terjadi karena adanya persetujuan yang bersifat sukarela dari kelas bawah atau masyarakat terhadap kelas atas yang memimpin,¹⁰ terutama persetujuan dari kelompok-kelompok utama dalam suatu masyarakat.¹¹ Karena hegemoni dicapai melalui persetujuan kelompok-kelompok utama dalam masyarakat, maka persetujuan tidak mengandung makna negatif, tetapi justru sebaliknya. Suatu tindakan, aturan, atau kebijakan yang diambil berdasarkan persetujuan berarti baik. Persetujuan kelas bawah ini terjadi karena berhasilnya kelas atas dalam

hegemoni. Akhirnya, pada 27 April 1937, ia meninggal di dalam penjara di Roma. Baca Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

⁶ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 19.

⁷ M. Clark, *Antonio Gramsci and the Revolution that Failed* (New Haven: Yale University Press, 1977), hlm. 2

⁸ V. I. Lenin, *What is to be Done?* (Oxford: Oxford University Press, 1963), hlm. 86-87, sebagaimana dikutip oleh Trent Brown, *Gramsci and hegemon*: <http://www.i-italy.org>.

⁹ Robert Bocock, *Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni*, terj. Ikramullah Mahyuddin (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm. 22-23

¹⁰ Gramsci, Antonio. *Selection From The Note Hoare and Nowell Smith* (ed). New York: International Publishers. 1976.

¹¹ Bocock, *Pengantar Komprehensif*, hlm. 1

menanamkan ideologi kelompoknya. Internalisasi ideologis ini dilakukan dengan membangun sistem dan lembaga-lembaga, seperti negara, common sense, kebudayaan, organisasi, pendidikan, dan seterusnya, yang dapat 'menyemen' atau memperkokoh hegemoni tersebut.

Berkenaan dengan negara, Gramsci melihatnya sebagai sesuatu yang kompleks menyeluruh aktivitas-aktivitas teoretis dan praktis yang dengannya kelas penguasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasinya, melainkan juga memenangkan kesetujuan aktif dari mereka yang diperintah. Negara dalam perspektif Gramsci ini tidak hanya menyangkut aparat-aparat pemerintahan, melainkan juga aparat-aparat hegemoni atau masyarakat sipil.¹² Negara dengan demikian merupakan 'sebuah instrumen dari kelas atas atau penguasa' dan sebagai 'alat resepsi oleh suatu kelas terhadap kelas lainnya'.¹³ Lewat negara ini kelas atas melakukan kebijakan-kebijakan, baik yang bersifat hegemonik maupun dominatif. Tujuan dari kebijakan itu adalah untuk kepentingannya sendiri, mempertahankan kekuasaannya.

Gramsci membedakan dua wilayah dalam negara, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik. Masyarakat sipil penting bagi konsep hegemoni karena merupakan wilayah "kesetujuan", "kehendak bebas", sedangkan masyarakat politik merupakan dunia kekerasan, pemaksaan, dan intervensi.¹⁴ Dengan demikian, pada wilayah masyarakat sipil itulah hegemoni

berlangsung karena masyarakat sipil merepresentasikan etika moral sebagai wilayah untuk menanamkan mekanisme ideologi dari kelas atas. Sementara itu, masyarakat politik merepresentasikan hubungan-hubungan yang bersifat dominatif dalam berbagai lembaga negara, seperti angkatan bersenjata, polisi, lembaga hukum, dan penjara. Dengan demikian, negara dalam teori Gramsci terbentuk dari hubungan antara masyarakat sipil dan masyarakat politik.

Di sisi lain, hegemoni terhadap kelas bawah tidak selamanya berjalan mulus, hambatan, dan rintangan bisa saja datang, terutama dari kelas-kelas yang tidak menerima hegemoni tersebut. Yang dilakukan untuk menangani ketidaksetujuan itu dilakukan dengan tindakan dominasi yang represif melalui aparatus negara, misalnya polisi. Dua kepemimpinan, dominasi dan hegemoni menjadi hal penting dalam teori hegemoni Gramscian.

Di sisi lain, pihak kaum intelektual dalam negara ikut berperan dalam teori hegemoni Gramsci. Konsep intelektual dalam tafsir Gramsci adalah semua orang yang mempunyai fungsi sebagai organisator dalam semua lapisan masyarakat dalam wilayah produksi sebagaimana dalam wilayah politik dan kebudayaan.¹⁵ Wilayah kebudayaan itu menyangkut proses penempatan pemikiran, penguasaan ide-ide yang bersifat umum dengan mengaitkan sebab dan akibatnya.¹⁶ Wilayah politik menyangkut wilayah kebijakan politik yang bersifat dominatif.

Kelompok intelektual menurut Gramsci terdiri dari kelompok intelektual organik dan kelompok intelektual

¹² Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 77.

¹³ Pengertian ini diberikan oleh Lenin sebagai salah satu tokoh Marxisime. Lihat Roger Simon, *Gagasan-gagasan*, hlm. 99

¹⁴ Faruk, *Pengantar Sosiologi*, hlm. 77.

¹⁵ Simon, *Gagasan-gagasan*, hlm. 141

¹⁶ A. Pozzolini, *Pijar-pijar Pemikiran Gramsci*. (Yogyakarta: Resist Book, 2005)

tradisinoal. Kedua kelompok intelektual itu bersifat terpisah, tetapi secara historis dapat bertumpang tindih. Kelompok intelektual tradisional adalah kaum intelektual yang terbatas pada lingkungan kaum tani dan borjuis kota kecil 'belum meluas dan bergerak oleh sistem kapitalis'. Kaum intelektual tradisional selalu 'menempatkan dirinya sebagai kelompok sosial yang dominan yang otonom dan independen', yaitu sebagai orang-orang kedudukannya dalam masyarakat mempunyai lingkaran inter-kelas tertentu. Sementara itu, kaum intelektual organik adalah intelektual dan para organisator politik dan pada saat yang sama juga bos-bos perusahaan, petani-petani kaya atau manajer perumahan, penguasa komersial dan industri, dan sebagainya. Kaum intelektual organik menyadari bahwa identitasnya dari yang diwakili dan yang mewakili, dan merupakan "barisan terdepan yang riil dari organik dari lapisan kelas papan atas yang di situ mereka masuk di dalamnya". Dengan adanya kondensasi dan pemusatan itu, mereka mempunyai daya tarik kuat dalam dalam semua kalangan intelektual.¹⁷

Adapun kedudukan dua intelektual dalam hegemoni adalah bahwa untuk dapat mencapai hegemoni maka ideologi harus disebar. Menurut Gramsci, penyebaran itu terjadi tidak dengan sendirinya, melainkan melalui lembaga-lembaga sosial tertentu yang menjadi pusatnya, misalnya bentuk-bentuk sekolahan dan pengajarannya, kelompok sosial yang dominan, dan sebagainya. Pusat-pusat itu mempunyai fungsionaris yang mempunyai peran penting, yaitu kaum intelektual.¹⁸ Kaum intelektual ini

menciptakan opini dan legalisasi atas berbagai isu-ideologis untuk menunjukkan proses hegemoni yang sah dan menampakkan wajah kelompok dominan yang demokratis.

Sebagai sebuah metodologi, proses hegemoni tersebut meniscayakan munculnya *counter-hegemony* (hegemoni tandingan), sebagai sebuah sikap sekaligus bentuk perlawanan dari kelas-kelas yang berkuasai.¹⁹ Kondisi ini bisa terjadi apabila "*the ruling class has failed in some major political undertaking for which, it has requested, or forcibly extracted, the consent of the broad masses (war, for example)...*"²⁰ Jika keadaan ini berlaku, Gramsci merumuskan kelas pemerintah: *is no longer 'leading' but only 'dominant', exercising coercive force alone, this means precisely that the great masses have become detached from their traditional ideologies, and no longer believe what they used to believe previously...*²¹

Hegemoni tandingan ini akan terus berjalan, apabila mendapat dukungan berupa peran serta intelektual organik dan keberadaan *civil society* yang berdaya.²² kemunculan wacana *civil society* dan intelektual organik ke permukaan secara intensif, diasosiasikan sebagai representasi *counter-hegemony*. Jadi, dapat dikatakan, di samping sebagai tempat berlangsungnya hegemoni dari kelas paling dominan, *civil society* juga

¹⁹ Baca S Hobden & R.W. Jones, "Marxist Theories of International Relations", dalam S. Smith & J. Baylis (eds). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm 211.

²⁰ Lihat C. Boggs, *Gramsci's Marxism* (London: Pluto Press, 1976), hlm. 40-41.

²¹ *Ibid.*, hlm. 41-42.

²² Istilah *civil society* sendiri dipelajari oleh Gramsci dari tokoh idealisme kenamaan GWF Hegel. Masyarakat sipil ini meliputi meliputi keseluruhan lingkungan dan aktivitas seperti serikat pekerja, sekolah, gereja, keluarga dan media.

¹⁷ Simon, *Gagasan-gagasan*, hlm. 139 – 152.

¹⁸ Faruk, *Pengantar Sosiologi*, hlm. 75.

memuat sasaran perubahan yang selama ini dilakukan dengan cara membuka lahan-lahan pemberdayaan dan pembebasan, sebagai bagian integral dalam upaya meng-*counter* kekuasaan negara.

Runtuhnya Hegemoni Negara terhadap Pesantren

Jauh sebelum sekolah-sekolah umum mulai memasuki pedesaan, terutama di Jawa pada akhir abad XVIII, pengajaran agama di langgar/surau, masjid, meunasah, atau dayah untuk tingkat dasar dan pesantren²³ untuk tingkat lanjut merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang tersedia bagi penduduk pribumi di pedesaan.²⁴ Pada masa lalu, pesantren merupakan tempat penyiapan para pemuda sebelum memasuki medan kehidupan masyarakat sebagai orang dewasa. Sebagai satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di

pedesaan, bisa diduga peran penting lembaga tersebut dalam mendidik dan menyiapkan rakyat pribumi menjadi elit²⁵ agama dan elit desa.

Di pesantren, kyai²⁶ berkedudukan sebagai guru, pemimpin, dan pemilik mutlak pesantren, sehingga menempatkannya sebagai satu-satunya figur dan manajer yang merumuskan visi, misi, dan bahkan kurikulum pesantren yang dipimpinya. Ia mempunyai kekuasaan mutlak untuk menentukan arah kebijakan pesantrennya. Dalam sistem pendidikan pesantren, kyai dipandang sebagai figur sentral yang mempunyai otoritas penuh

²⁵ Konsep *elite* mulai digunakan pada abad ke-17 M untuk melukiskan sesuatu kelompok yang sangat istimewa (*particular excellence*); yang kemudian penggunaan konsep ini diperluas untuk menunjuk kelompok-kelompok superior di dalam masyarakat, termasuk misalnya unit-unit tertentu yang memiliki kehebatan sangat istimewa dalam kemiliteran atau kalangan-kalangan bangsawan tertentu yang sangat terhormat. Keberadaan kelompok elite merupakan suatu keniscayaan dalam setiap masyarakat manapun. Para perintis kajian mengenai elite seperti Filfredo Pareto, Gartano Mosca, dan Marie Kolabinsa melihat bahwa cara paling sederhana untuk memahami elite bagi mereka adalah bahwa di dalam masyarakat di mana pun senantiasa terdapat orang-orang yang menduduki posisi atau status lebih tinggi yang jumlahnya biasanya lebih sedikit dan di pihak lain terdapat orang-orang yang menduduki posisi lebih rendah yang jumlahnya lebih besar. Dalam hubungan ini posisi atau status dapat ditentukan dengan mengacu nyaris semua aspek kehidupan seperti misalnya kekayaan, keagamaan, kebangsawanan, kemiliteran, dan pemerintahan. Lihat Tom Bottomore, *Elites and Society*, 2nd ed. (London, New York: Routledge, 1993)

²⁶ Di beberapa tempat di Indonesia, penggunaan istilah kiai dibedakan dengan istilah ulama. Ulama adalah istilah yang lebih umum dan merujuk kepada seorang Muslim yang berpengetahuan agama Islam. Ulama adalah kelompok yang secara jelas mempunyai fungsi dan peran sosial sebagai cendekiawan penjaga tradisi yang dipandang sebagai dasar identitas primordial individu dan masyarakat. Dengan kata lain, fungsi ulama yang terpenting adalah peran ortodoks dan tradisional mereka sebagai penegak keimanan dengan cara mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan dan memelihara amalan-amalan keagamaan ortodoks di kalangan kaum Muslim. Lihat Hiroko Horikoshi, *A Traditional Leader in a Time of Change* (Ph.D. Thesis, University of Illinois, 1976), hlm. 232.

²³ Walaupun dari sisi nama dan tingkatan yang berbeda-beda, namun kesemuanya memiliki pemahaman yang sama baik secara fungsional, substansial, operasional, dan mekanikal. Secara fungsional mereka dijadikan sebagai wadah untuk menggembelng mental dan moral di samping wawasan kepada para pemuda dan anak-anak untuk dipersiapkan menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Secara substansial dapat dikatakan bahwa mereka merupakan panggilan jiwa spiritual dan religius dari para tengku, buya, dan kyai yang tidak didasari oleh motif materiil, akan tetapi murni sebagai pengabdian kepada Allah. Secara operasional kesemuanya muncul dan berkembang dari masyarakat, bukan sebagai kebijakan, proyek apalagi perintah dari para sultan, raja, atau penguasa. Secara mekanikal bisa dipahami dari hasil pelacakan historis bahwa kesemuanya tumbuh secara alamiah dan memiliki anak-anak cabang yang dari satu induk mengembang ke berbagai lokasi akan tetapi masih ada ikatan yang kuat secara emosional, intelektual, dan kultural dari induknya. Lihat Ainurrofiq Dawam, "Mencandra Trend Pendidikan Islam Indonesia Masa kini", *Swara Ditperta*s, No. 16 Th. II (30 September 2004)

²⁴ Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat; Kyai Pesantren - Kyai Langgar di Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 140.

dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk perkembangan dan kelangsungan suatu pesantren. Karenanya, bisa dipahami ketika perjalanan suatu pesantren banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, kharisma, wibawa, serta keterampilan kyai dalam mengelola pesantrennya.

Namun demikian, secara umum pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islâm²⁷ dengan cara non klasikal, di mana seorang kiai mengajar santrinya²⁸ berdasarkan kitab-kitab yang berbahasa Arab yang ditulis oleh para ulamâ' besar pada abad pertengahan (abad XII – XVI M). Kitab-kitab tersebut, baik kitab *matn*, *syarah*, maupun *hasyiyah*²⁹ adalah kitab-kitab *mu'tabar* dalam lingkungan *Ahlus Sunnah Wal Jamaah*. Kitab-kitab tersebut, misalnya, *Taqrib* atau *Fathul al-Qarib*, *Safinatun Najjah*, *Sullam al-Taufiq*, *al-Sittin Mas'alah*, *Minhajul Qowim*, *al-Hawasyi al-Madaniyat*, *Fath al-Qarib*, *al-Iqna*, dan *Fath*

²⁷ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 138.

²⁸ John, sebagaimana dikutip oleh Zamakhsyari Dhofier, berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, sedangkan CC Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari kata *shastri* yang dalam bahasa India adalah orang-orang yang tahu buku-buku suci Agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci Agama Hindu. Kata *Shastri* sendiri berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau pengetahuan. Dalam arti sempit, santri berarti seorang yang sedang belajar di pondok pesantren, sedangkan dalam arti luas ia merujuk pada masyarakat yang taat menjalankan ajaran agama. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 17. Tentang pola keberagamaan santri di Jawa, baca Clifford Geertz, *Priyayi, Santri, dan Abangan dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981).

²⁹ Kitab *matn* adalah kitab yang berisi uraian singkat dan padat. sedangkan kitab *syarah* adalah kitab penjelasan secara lebih panjang apa yang ditulis dalam kitab *matn*. Terakhir, kitab *Hasyiyah* adalah kitab yang berisi kritik, komentar, revisi dan berbagai pendapat ahli tentang hal-hal yang ditulis dalam kitab *matn* maupun *syarah*.

al-Muin. Setelah kitab tersebut baru dilanjutkan dengan kitab fikih lanjutan, baik yang berupa pendalaman materi ibadah ubudiyah maupun materi yang lain. Di bidang tauhid, kitab-kitab kuning yang dipelajari di pondok pesantren umumnya adalah pemikiran Asy'ariyah yang berisi antara lain sifat *wajib*, *mustahil*, dan *jaiz* Allah. Judul kitab tersebut antara lain *al-Aqid al-Shubra*, *Aqidah al-Syamsyah*, *Matn al-Jawharat*, *Matn al-Bajuri*, dan *al-Kharidat al-Baliyat*.

Karenanya, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memerankan dirinya sebagai media dalam pentransmisi ilmu-ilmu keagamaan melalui pengkajian kitab-kitab *turats*. Sebuah tradisi yang telah berlangsung lama di dunia pesantren. Penguasaan kitab-kitab *turats* menjadi sangat penting santri, karena ia menjadi identitas kesantrian. Standar kualitas seorang santri diukur dari tingkat pemahaman dan penguasaannya akan kitab-kitab *turats*/kuning tersebut. Pesantren dan kitab kuning sudah menjadi dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam pekungannya, terutama sejak awal abad ke-20, negara melakukan hegemoni terhadap pesantren melalui penyebaran wacana modernisasi, terutama sekularisasi ilmu pengetahuan sebagai salah satu elemen modernisasi. Tetapi saat ini, pemerintah Belanda hanya memandang bahwa lembaga pendidikan pribumi yang ada, termasuk pendidikan di pesantren, menerapkan metode pengajaran yang tidak cocok untuk usaha modernisasi pendidikan.³⁰ Karenanya, pesantren direkomendasikan untuk mengubah metode dan sistem

³⁰ Pradjarta Dirdjisanjoto, *Memelihara Umat, Kiai Pesantren – Kiai Langgar* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 166.

pengajarannya agar sesuai dengan kondisi modern. Di samping itu, berbagai pandangan kaum intelektual, yang berperan sebagai intelektual organik, tentang pentingnya modernisasi disebarkan. Modernisasi, misalnya, dipandang sebagai panser raksasa³¹ yang melaju di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kehidupan modern adalah sebuah dunia yang tak terkendali dengan langkah, cakupan, dan kedalaman perubahannya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Masyarakat maun tidak mau akan dengan sendirinya terseret ke dalam dunia modern. Karenanya, mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu bertahan seperti keadaan semula dan menyelaraskan diri dengan perubahan yang tidak pernah berhenti.

Beberapa pesantren mulai berfikir untuk melakukan pembaruan di bidang pendidikan dan pengajaran. Salah satunya adalah pesantren Tebuireng Jombang. Pesantren yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari ini mulai memperkenalkan sistem klasikal dan pelajaran-pelajaran sekular, seperti matematika, geografi, dan Bahasa Belanda pada tahun 1919. Bahkan, prosentase 70% pelajaran sekular dan 30% pelajaran agama mulai diterapkan di Madrasah Nizhamiyah yang didirikan di pesantren ini pada 1934.³² Kebijakan untuk menerapkan sistem sekolah modern di pesantren ini tampak telah mengubah tujuan utama pesantren. Langkah Kyai Hasyim, sebagai pendiri NU, di pesantren ini memiliki pengaruh besar atas dan selanjutnya diikuti oleh sejumlah kyai pesantren lainnya.

Beberapa pesantren mendirikan madrasah, baik tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah, maupun 'alimah, untuk mengajarkan baik pendidikan agama sekaligus pendidikan umum.

Hegemoni negara berlanjut ketika pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan kebijakan yang berusaha untuk menjadikan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Konsekuensinya, madrasah harus mengajarkan pelajaran umum minimal 60%, di samping juga pelajaran agama sebanyak 40%. Madrasah yang memenuhi persyaratan tersebut, lulusannya disamakan dengan lulusan sekolah umum setelah mengikuti ujian negara. Dengan kata lain, ijazah madrasah memiliki nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum, sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih tinggi atau siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang sederajat.³³ Akibatnya, banyak pesantren yang mengelola pendidikan madrasah melakukan reformasi pendidikannya dari sistem *salaf* ke sistem *khalaf* (modern), atau paling tidak menggabungkan kedua sistem tersebut.

Pada saat negara menancapkan hegemoninya, muncul *counter-hegemony* (hegemoni tandingan) dari kalangan pesantren. Mereka tetap mempertahankan sistem pendidikan khas pesantren secara mandiri baik kurikulumnya maupun proses pembelajaran dan pendidikannya. Di pesantren-pesantren itu tetap mengajarkan materi agama dengan menggunakan kitab-kitab berbahasa

³¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Predana Media, 2005), hlm. 553

³² Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 106.

³³ Ketentuan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri atau SKB Tiga Menteri tanggal 24 Maret 1975.

Arab, baik klasik maupun kontemporer sesuai dengan tingkatannya. Mereka juga tetap mempertahankan model pembelajaran dengan *sorogan*, *wetonan* dan *bandongan*, walaupun sebagian dari mereka telah menggunakan klasikal, baik dalam bentuk madrasah seperti Madrasah Diniyah Tingkat Ula/-Awaliyah, Tingkat Diniyah Wustho dan Tingkat Diniyah Ulya maupun dengan model Kuliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI), Dirasatul Mu'allimin Al-Islamiyyah (DMI) dan Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI).

Keengganan pesantren tersebut untuk mengikuti standar kurikulum Kementerian Agama RI maupun Kementerian Pendidikan Nasional membuat negara 'luluh'. Sejak 1998, pemerintah melalui kedua kementerian tersebut akhirnya mengakui model pesantren tersebut dengan memberikan SK penyetaraan dengan MA melalui SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan penyetaraan dengan SMA melalui SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional. Model pesantren yang demikian disebut sebagai pesantren *mu'adalah* (penyetaraan).³⁴ Hingga akhir 2010, terdapat 27 pondok pesantren yang

di-*mu'adalah*-kan dengan MA berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tanggal 9 Desember 2010. Pondok pesantren tersebut, antara lain, adalah Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep, Dirasatul Mualimin al-Islamiyyah (DMI) PP al-Hamidy Banyuwangi Pamekasan, Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Pesantren Lirboyo Kediri, Madrasah Aliyah Hidayatul Mu'tadi'en, Pesantren Sidogiri, Madrasah Aliyah Miftahul Ulum, Pesantren Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati, Pesantren Darul Rahman Jakarta, Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Pesantren Termas, Madrasah Aliyah Salafiyah PP Salafiyah Pasuruan, Madrasah Ulya PP Miftahul Mu'tadiin Nganjuk, Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan, Tarbiyatul Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI) Pesantren Darul Muttaqien Bogor, Kuliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren Raudhatul Hasanah Medan, dan KMI Pesantren Baitul Arqom, Balung Jember.

Dalam pesantren *mu'adalah* itu, kurikulum dalam arti jenis kitab, alokasi waktu pembelajaran dan kalender akademiknya sepenuhnya tergantung kepada kyai atau dewan kyai sebagai pemilik pesantren. Bahkan kitab atau buku yang disusun kyai dapat dijadikan sebagai rujukan utama dalam pembelajaran di pesantren tersebut. Pemerintah hanya menyarankan beberapa kitab yang bisa digunakan di pesantren *mu'adalah*, baik dalam bidang Qur'an-Hadits, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Bahasa Arab, Fiqh, dan Ushul Fiqh. Dalam bidang Qur'an-Hadits, kitab-kitab yang bisa dijadikan rujukan, misalnya, adalah *Tafsir al-Jamal*, *Tafsir Baidhawi*, *al-Asas fi al-tafsir*, *Tafsir Ibnu Katsir*, *Fath al-Bâry (Syarah al-Bukhâri)*, *al-Kutub al-Sittah*, dan *Riyâdh al-Shâlihîn*. Dalam bidang

³⁴ Secara terminologi, *mu'adalah* berarti proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren dengan menggunakan kriteria baku dan kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Dalam kasus pondok pesantren, terdapat dua model *mu'adalah*, yaitu: *Pertama*, pondok pesantren yang lembaga pendidikannya di-*mu'adalah*-kan dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri, seperti Universitas al-Azhar Cairo Mesir, Universitas Umm al-Qurra Arab Saudi maupun dengan lembaga-lembaga non formal keagamaan lainnya yang ada di Timur Tengah, India, Yaman, Pakistan atau di Iran. *Kedua*, pondok pesantren *mu'adalah* yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah dalam pengelolaan Depag RI dan yang disetarakan dengan SMA dalam pengelolaan Diknas. Keduanya mendapatkan SK dari Dirjen terkait.

Bahasa Arab, yang direkomendasikan adalah *al-Jurumiyah*, *Matan Bina*, *al-Kaylani*, *al-Nahwu al-Wâdih li al-Tarbiyah*, *Mutammimah*, *Qawâ'id al-Lughatil Arabiyah*, *al-Nahw al-Wâdhih li al-Tsanâwi*, dan *Alfiyah* dan *Matannya*. Dalam bidang Fiqh, pesantren *mu'adalah* dapat menggunakan *Fath al-Qarib*, *al-Mu'in al-Mubin*, *Kifâyat al-Akhyâr*, *Fiqh al-Sunnah*, *al-Muhadzdzab*, *Bidâyat al-Mujtahid*, dan *a1-Fiqh 'ala Madzâhib al-Arba'ah*. Sedangkan dalam bidang Ushul Fiqh, kitab-kitab yang bisa digunakan adalah *Mabâdi Awaliyah*, *al-Sulam*, *al-Bayân*, *Ushul Fiqh Abd al-Wahab Khallâf*, dan *Al-Khudhary Bek*.³⁵

Sebagai sebuah saran, kitab-kitab tersebut tidak wajib digunakan di pesantren *mu'adalah*. Dirasatul Mu'alimin al-Islamiyyah (DMI) PP. al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan, sebagai salah satu pesantren *mu'adalah*, menggunakan beberapa materi dan jenis kitab di luar yang disarankan oleh Kemenag. Pesantren tersebut, misalnya, menambah materi pelajaran *Tadrib al-Qur'an*, *Ilm al-Faraid*, dan *Tarikh al-Islam* baik pada tingkat (*marhalah*) *Wustha* maupun *'Ulya*. Jenis kitab yang diajarkan juga tidak sepenuhnya mengikuti saran Kemenag. Kitab-kitab tersebut, misalnya, adalah *Khalashah Nur al-Yaqin* (Tarikh al-Islam), *Ghayat al-Ushul* dan *Latha'if al-Isyarah* (Ushul Fiqh), *al-Qawâ'id al-Asasiyah* (Ilm al-Hadits), dan *Bulugh al-Maram* (Hadits).

Demikian juga, di pesantren *mu'adalah*, evaluasi belajar direncanakan dan dilaksanakan oleh pondok pesantren yang bersangkutan. Para santri di pondok pesantren *mu'adalah* tidak diwajibkan untuk mengikuti UN (Ujian Nasional).

Evaluasi akhir belajar dilaksanakan sebagaimana khas pesantren, yakni melalui kegiatan *imtihan* tahunan, yang biasanya dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan. Hasil dari penilaian tahap akhir ini digunakan sebagai bahan pertimbangan kelulusan santri dan pemberian ijazah. Ijazah ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan, sebagaimana yang berlaku pada ijazah lulusan MA dan SMA.

Penutup

Proyek penyeragaman, termasuk penyeragaman kurikulum bagi lembaga pendidikan pesantren, telah dilakukan sejak rezim Orde Baru menancapkan kekuasaannya. Pola ini menjadi runtuh mengikuti berakhirnya rezim tersebut pada 1998. Sejak era tersebut, pola pemerintahan menjadi desentralistik, yakni memberikan otonomi kepada daerah. Konsekuensinya, ia membatasi intervensi negara dalam wilayah masyarakat, dan pada saat yang sama menempatkan pemerintah sebagai fasilitator. Pada masa inilah, beberapa pesantren kembali kepada *genuine mission* sebagai lembaga pencetak kaum elit agama. Pesantren yang demikian disebut sebagai pesantren *mu'adalah*, yakni pesantren yang merumuskan kurikulumnya berdasarkan kearifan lokal yang dimilikinya.

Sejak awal pesantren semacam ini 'enggan' untuk mengikuti kurikulum yang digariskan oleh pemerintah. Keengganan tersebut dipandang sebagai *counter-hegemony* terhadap hegemoni pemerintah dalam menentukan kurikulum bagi pesantren. Kurikulum dalam hal ini mencakup materi dan jenis kitab yang diajarkan, alokasi waktu yang digunakan, dan sistem evaluasi akhir pembelajaran. Pesantren model ini

³⁵ Lihat Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009).

akhirnya mendapatkan pengakuan dari pemerintah, sehingga ijazahnya dapat

digunakan sebagaimana ijazah MA dan SMA. *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb*□

